

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI  
KOTA LANGSA PROVINSI ACEH**

Aldi Sahputra

NPP.30.0004

*Asdaf Kota Langsa, Provinsi Aceh*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email : [aldisahputra413@gmail.com](mailto:aldisahputra413@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Nur Saribulan, S.IP, M.PA

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** The Family Hope Program (PKH) is a conditional social assistance program created by the government to overcome poverty to the community under the responsibility of the Ministry of Social Affairs. The Family Hope Program (PKH) has been regulated in the Regulation of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia No.1 of 2018. The author focuses on the problem which is currently being faced, namely the problem of data collection, more precisely about synchronizing data that still overlaps. Many of the PKH recipients whose names, NIK and Family Cards are not synchronized between DTKS and Dukcapil Data so that many experience underpayments and even the funds cannot be disbursed again due to incorrect input of recipient data, then also with the Basic Education Data (Dapodik) for recipients of education components, especially school children, Dapodik data that is not synchronized with DTKS has an impact on the distribution of funds that cannot be disbursed. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how the implementation of the Family Hope Program (PKH) in reducing poverty in Langsa City and seen from the obstacles and support as well as efforts made to overcome implementation obstacles. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research method. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The focus of this research is using Van Meter and Van Horn's theory, namely Policy Standards and Objectives, Resources, Characteristics of Implementing Organizations, Implementing Attitudes, Inter-Organizational Communication and Implementing Activities, and the Social, Economic and Political Environment. **Results:** Based on the results of the study, it shows that the Implementation of PKH in poverty alleviation in Langsa City has not fully run well, there are still obstacles in activities related to technicalities in the implementation of PKH, but related to the distribution of PKH and also the target Beneficiary Families (KPM) have been running well. There are supports and obstacles in the implementation of the Family Hope Program (PKH) in poverty reduction in Langsa City, Aceh Province. The supporters are the consistency of PKH Facilitators at this time which is very supportive of the program, the adequacy of personnel already owned by PKH Facilitators and Communication that has been running well between internal and external. While the obstacles are inadequate operational costs when going to the field, facilities and infrastructure for PKH Facilitators, and village heads have not been active in collecting data on the poor in their respective villages.

**Keywords: Implementation, Family Hope Program (PKH), Poverty**

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** *Program Keluarga Harapan (PKH)* ialah Program program bantuan sosial bersyarat yang dibuat pemerintah untuk mengatasi angka kemiskinan kepada masyarakat yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) telah diatur di dalam Peraturan Kementrian Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018. Penulis berfokus pada permasalahan yang mana saat ini sedang dihadapi yaitu masalah pendataan, lebih tepatnya tentang penyinkronan data yang masih tumpang tindih. Banyak dari penerima PKH yang nama, NIK dan Kartu Keluarganya tidak sinkron antara DTKS dengan Data Dukcapil sehingga banyak yang mengalami kurang bayar bahkan dananya tidak dapat cair kembali diakibatkan penginputan data penerima yang salah, kemudian juga dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) penerima komponen pendidikan khususnya anak sekolah, data Dapodik yang tidak sinkron dengan DTKS berdampak pada penyaluran dana yang tidak dapat dicairkan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Langsa serta dilihat dari hambatan dan dukungan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Sikap Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PKH dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih terdapat hambatan didalam kegiatan terkait dengan teknis dalam pelaksanaan PKH, tetapi terkait dengan penyaluran PKH dan juga sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah berjalan dengan baik. Terdapat dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa Provinsi Aceh. Pendukungnya yaitu Konsistensi Pendamping PKH pada saat ini sangat mendukung jalannya program, kecukupan personil yang sudah dimiliki Pendamping PKH dan Komunikasi yang sudah berjalan dengan baik antar internal maupun eksternal. Sedangkan hambatannya adalah biaya operasional yang belum memadai saat turun ke lapangan, sarana dan prasarana kepada pendamping PKH, dan kepala desa belum aktif dalam melakukan pendataan terhadap warga miskin yang ada di desanya masing-masing.

**Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan kini menjadi fenomena yang menarik perhatian pemerintah di seluruh dunia. Salah satu faktor yang menciptakan keterbelakangan dan penghambat pembangunan nasional adalah tingginya angka kemiskinan (Wibowo, 2017). Kemiskinan dapat memiliki efek sinergis pada masyarakat secara keseluruhan. Kemiskinan juga merupakan pintu gerbang masalah sosial lainnya. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi kemiskinan. Upaya ini dilaksanakan agar memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin dengan tujuan untuk meningkatkan kekayaannya. Upaya pengentasan kemiskinan di masa lalu dinilai masih jauh dari harapan. Jumlah orang miskin bertambah, bukan berkurang. Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan, salah satu program pemerintah yang dikeluarkan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan berbasis rumah tangga yaitu Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH)

dijalankan sebagai pelaksanaan dari dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin yang telah terdata berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. Program bantuan ini telah berjalan sejak tahun 2007 oleh Kementerian Sosial. Tujuan umum PKH yaitu untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Bantuan PKH memfokuskan kepada bantuan terkait fasilitas Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan di Provinsi Aceh sudah berjalan secara menyeluruh di Aceh pada tahun 2013 dengan sasaran dari penyaluran dana PKH ini adalah masyarakat yang tergolong miskin di desa dan perkotaan. Kota Langsa merupakan salah satu Kota yang sudah melaksanakan program ini. Terdapat 5 kecamatan di Kota Langsa sebagai Keluarga Penerima Manfaat yaitu Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Baro, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Timur (Kota Langsa Dalam Angka, 2022).

**Tabel 1.1**  
**Daftar Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Langsa**

| <b>Tahun</b>                         | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Jumlah Penduduk (ribu)</b>        | 174.318     | 176.811     | 185.971     | 188.878     |
| <b>Jumlah penduduk miskin (ribu)</b> | 18,73       | 18,62       | 18,65       | 19,78       |
| <b>Persentase penduduk miskin</b>    | 10,79       | 10,57       | 10,44       | 10,96       |

Sumber: Badan Pusat Statistik Langsa, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan jumlah penduduk miskin di Kota Langsa pada tahun 2018 sebanyak 18,73 ribu jiwa, selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,11 ribu jiwa menjadi 18,62 ribu jiwa. Namun, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,03 ribu jiwa menjadi 18,65 ribu jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sangat drastis naik sebesar 1,13 ribu jiwa menjadi 19,78 ribu jiwa. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun 2018-2021 belum stabil bahkan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Dinas Sosial Kota Langsa terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi tingkat kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan waktu penyaluran 4 kali dalam setahun. Namun program ini belum berjalan sesuai yang di harapkan.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Langsa) Berdasarkan fakta di lapangan menurut pernyataan dari Ibu Laras Aprillia, S.Pd (Pendamping PKH Kota Langsa) terdapat beberapa permasalahan yang saat ini sedang dihadapi yaitu masalah pendataan, lebih tepatnya tentang penyinkronan data yang masih tumpang tindih. Pada tahun 2022 ini semua data penerima PKH di Data Terpatu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus sinkron dengan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), banyak dari penerima PKH yang nama, NIK dan Kartu Keluarganya tidak sinkron antara DTKS dengan Data Dukcapil sehingga banyak yang mengalami kurang bayar bahkan dananya tidak dapat cair kembali diakibatkan penginputan data penerima yang salah,

begitu juga dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) penerima komponen pendidikan khususnya anak sekolah, data Dapodik yang tidak sinkron dengan DTKS berdampak pada penyaluran dana yang tidak dapat dicairkan. Permasalahan kedua yaitu pemutakhiran data yang dilakukan secara manual, hal ini disebabkan karena terdapat kendala pada aplikasi E-PKH sehingga perlu dilakukan perbaikan, hal ini berdampak pada pelaksanaan PKH menjadi tidak efektif dan efisien.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pelaksanaan implementasi, efektivitas maupun evaluasi dalam pelaksanaan PKH. Penelitian Ganang Dibya Angkasa dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Desa Kedungrojo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban (Ganang Dibya Angkasa, 2018), Hasil penelitian ini menjelaskan penyelenggaraan Program Keluarga Harapan pada Desa Kedungrojo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Pada penyelenggaraannya belum memenuhi standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Masih adanya persoalan warga yang belum sejahtera dalam perekonomiannya. Sasaran dari kebijakan masih belum efektif sebab masih terdapat warga yang tidak masuk kriteria dan juga ada warga yang masuk dalam kriteria tetapi tidak masuk dalam daftar penerima PKH.

Penelitian Amir Syarifudin Kiwang dengan judul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Kupang (Amir Syarifudin Kiwang, 2018), Hasil Penelitian ini menunjukkan Evaluasi Penyelenggaraan Keluarga Program Harapan (PKH) di Kota Kupang telah dijalankan secara tepat sejak 2007, tetapi masih memiliki beberapa kendala diantaranya interaksi antar sektor dan struktur birokrasi pada prosedur penyelenggaraan program keluarga harapan sehingga sering menimbulkan masalah di lapangan. Peserta PKH yang mengikuti tidak komitmen dan mendapatkan sanksi.

Penelitian Winda Mediana dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Winda Mediana, 2021), Hasil dari Penelitian ini menunjukkan penyelenggaraan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau belum sepenuhnya memberikan manfaat, KPM PKH menemui masalah ketika melaksanakan akses sarana kesehatan dan pendidikan, sosialisasi kebijakan PKH saat masa Covid-19 belum efektif, SOP untuk melaporkan persoalan KPM PKH yang bersinggungan dengan BPNT yang tidak tersistem dan bermasalah data administrasi KPM PKH di E-PKH.

Penelitian Baiq Reinelda Tri Yunarni dengan judul Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu) (Baiq Reinelda Tri Yunarni, 2019), Hasil Penelitian menunjukkan penyelenggaraan PKH di Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu telah diselenggarakan secara tepat, sosialisasi berjalan sesuai yang diharapkan dan juga diamati dari jumlah masyarakat miskin tiap tahunnya semakin berkurang dengan jumlah masyarakat yang semakin meningkat.

Penelitian Rismala Waty dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan Tahun 2016 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan (Rismala Waty, 2017), Hasil Penelitian menunjukkan pelaksanaan PKH di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan belum sesuai dengan yang diharapkan. Solusinya yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bintan yang

menyelenggarakan di Kabupaten Bintan dalam penerapan PKH harus lebih meningkatkan pemantauan dan evaluasi dari tiap prosedur penyelenggaraan PKH.

Penelitian Clara Dheby dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Clara Dheby, 2017), Hasil Penelitian menunjukkan penyelenggaraan PKH di Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada bidang kesehatan baik layanan keuangan dan penyediaan fasilitas kesehatan telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan di bidang pendidikan belum berjalan dengan maksimal tepatnya dalam mengatasi anak buta aksara dan penyediaan rumah singgah.

Penelitian Muhammad Daud dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Muhammad Daud, 2018), Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PKH mampu dalam mengatasi kemiskinan yang terdapat di Desa Kajhu dan bisa mensejahterakan masyarakat khususnya komponen kesehatan dan pendidikan, sehingga anak putus sekolah bisa melanjutkan pendidikannya.

Penelitian Ratna Sugiyana dengan judul Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Rengasdengklok (Ratna Sugiyana, 2022), Hasil Penelitian menunjukkan pelaksanaan PKH di Dinas Sosial Kabupaten Donggala belum berjalan dengan tepat sasaran, sebab program ini hanya berhasil mengurangi beban pengeluaran dan merubah persepsi/pola pikir KPM saja tetapi tidak membantu banyak dalam peningkatan ekonomi.

Penelitian Yosua Mandolang dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan (Yosua Mandolang, 2019), Hasil Penelitian menunjukkan pelaksanaan PKH di Selatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa belum berlangsung optimal, terdapat kekurangan pada dimensi komunikasi. Kendalanya yaitu Dinas Sosial belum maksimal dalam berkomunikasi secara intens dengan instansi terkait yaitu BPS, hal ini yang menjadi penyebab banyak masyarakat miskin yang belum dapat menerima bantuan PKH ini masyarakat miskin belum dapat menerima program ini.

Penelitian Hasmini dengan judul Implementasi Program Kesejahteraan Keluarga Harapan di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara (Hasmini, 2021), Hasil Penelitian menunjukkan penyelenggaraan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara telah berlangsung secara optimal, namun masih terdapat sejumlah hal yang harus dioptimalkan dan di atur secara baik. Misalnya, para pendamping PKH tidak menyertakan masyarakat pada penyelenggaraan sosialisasi PKH, minimnya pemahaman calon PKH mengenai mekanisme PKH.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni bagaimana Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa. Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, selain itu pengukuran indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn (1975) dengan membagi keberhasilan implementasi menjadi enam variabel yakni standar dan sasaran kebijakan, lalu sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, kemudian komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

#### **1.5 Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Langsa serta dilihat dari hambatan dan dukungan serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Langsa dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan Implementasi PKH di Kota Langsa Provinsi Aceh.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan sifat deskriptif, desain penelitian ini dipilih sebab lebih tepat dalam mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa. Metode Kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk menggali serta mengetahui maksud dari seseorang maupun dari sekelompok orang dinilai memiliki masalah sosial ataupun kemanusiaan. Deskriptif sendiri ialah metode penelitian yang dilaksanakan guna menemukan nilai variabel bebas, tidak perlu untuk merumuskan perbandingan atau menggabungkan variabel satu melalui variabel lain (Sugiyono, 2020:64). Penelitian kualitatif bermaksud guna mengungkap informasi kualitatif sehingga deskripsi masalah lebih menekankan pada proses dan makna masalah. Kajian ini secara sistematis menghimpun, mengolah dan menganalisis permasalahan lapangan untuk menarik kesimpulan mengenai permasalahan Implementasi PKH Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Para narasumber yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Langsa, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Koordinator PKH Kota Langsa, Pendamping PKH Kota Langsa, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Langsa sebanyak 3 orang.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa Provinsi Aceh menggunakan pendapat dari Van Meter dan Van Horn (1975) dengan membagi keberhasilan implementasi menjadi enam variabel yakni standar dan sasaran kebijakan, lalu sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, kemudian komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana, sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Langsa**

#### **3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan**

Penulis mewawancarai Kepala Dinas Sosial Kota Langsa didalam pelaksanaan PKH di Kota Langsa yakni harus memperhatikan teori, asas, dan kaidah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta norma, standar, dan praktik hukum secara universal sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian halnya juga penulis mewawancarai Koordinator PKH Kota Langsa mengenai pelaksanaan PKH di Kota Langsa yang mengacu pada Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan tentunya Peraturan Kementerian Sosial No.1 Tahun 2018 Tentang PKH yang menyebutkan bahwa pelaksanaan PKH sudah sesuai prosedur dan mekanisme dari peraturan tersebut.

#### **3.2 Sumber Daya**

Untuk melihat implementasi dari suatu kebijakan bisa dinilai dari ketersediaan sumber daya baik itu sumber daya manusia, dan dana insentif dalam pelaksanaan program yang dapat mendorong atau memfasilitasi pelaksanaan yang efektif dan efisien serta sumber daya fasilitas yang dapat menunjang proses pelaksanaan PKH. Penulis mewawancarai Kepala Dinas Sosial

Kota Langsa bahwa SDM dalam pelaksanaan PKH sudah cukup, dalam arti sudah terpenuhi kuotanya dan sudah dibagi tugas dan fungsi masing-masing baik yang bekerja di bagian administrasi maupun di lapangan, saya juga menghimbau agar mereka selalu sungguh-sungguh dalam pekerjaan mereka agar masyarakat menerima respon yang baik kepada seluruh petugas pelaksana PKH, kemudian untuk dana dan insentif beliau mengatakan gaji yang diberikan kepada pegawai saat ini tidak mengalami kendala, begitupun dengan petugas pendamping PKH. Gaji kepada pegawai dan pelaksana selalu dicairkan setiap sebulan sekali sesuai dengan jabatan masing-masing. Begitupun dengan insentif kepada pegawai maupun petugas pelaksana PKH. Untuk insentif pegawai TPPnya sesuai dengan jabatannya masing-masing dan untuk insentif pendamping PKH mereka diberikan bonus setiap 3 bulan sekali berjumlah 300 ribu. Terkait dengan dana dan insentif, penulis menerima masukan dari salah satu pendamping PKH Kota Langsa bahwa mereka berharap semoga ada insentif yang lebih kepada mereka dalam pelaksanaan PKH terutama dalam biaya operasional dan fasilitas.

### **3.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik dari pelaksanaan kebijakan atau program harus memiliki karakteristik yang tegas dan ketat serta taat pada peraturan dan sanksi hukum yang berlaku. Dalam dimensi ini karakteristik organisasi pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn dilihat dari beberapa hal diantaranya konsisten pelaksana dan kompetensi pelaksana. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, bahwa seluruh *stakeholder* terkait baik itu Operator SIKS-NG, Pendamping PKH itu sudah konsisten dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka, mereka juga rutin dalam melaksanakan pertemuan di desa yaitu P2K2 pada setiap bulannya, kemudian juga seluruh petugas tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sampai saat ini. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin bahwa pendamping itu selalu memiliki konsistensi selalu bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya mereka dengan melakukan pendampingan kepada KPM setiap bulannya dan juga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman KPM.

Kemudian terkait dengan kompetensi pelaksana, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin juga menyampaikan para petugas dalam pelaksanaan PKH sudah cukup paham dan mengerti terkait tata tertib mekanisme dan memiliki integritas yang tinggi dan para pendamping juga telah mengikuti diseleksi berdasarkan mekanisme serta tata tertib oleh Kementerian Sosial sehingga kompetensi mereka tidak perlu diragukan lagi baik bekerja secara tim maupun kemampuan personal. Melihat dari hal tersebut penulis melihat bahwa para pendamping PKH yang langsung berinteraksi dengan masyarakat telah memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dengan baik.

### **3.4 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Keberhasilan dalam Pelaksanaan PKH di Kota Langsa juga dipengaruhi bagaimana keakurasian dan konsistensi komunikasi yang baik antar internal maupun eksternal para *stakeholder* kebijakan. Berdasarkan wawancara kepada Kepala Dinas Sosial Kota Langsa didalam pelaksanaan PKH terkait dengan koordinasi selalu dilakukan dinas kesehatan maupun kepada camat, kepala desa maupun kepada pihak ketiga yaitu penyalur dana diantaranya Bank BSI dan Kantor Pos, dan terkait koordinasi dalam lingkungan internal selalu berjalan baik, mereka selalu memberikan laporan kepada saya terkait kendala yang ada di desa. Demikian halnya Demikian halnya juga penulis mewawancarai Koordinator PKH Kota Langsa mengenai pelaksanaan PKH di Kota Langsa terkait dengan koordinasi, beliau menyampaikan bahwa selalu dilakukan kerja sama antara stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH kemudian juga antar internal organisasi selalu dijalankan untuk pelaksanaan PKH yang selaras.

### **3.5 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Pada teori Van Meter dan Van Horn selain internal organisasi, ada juga faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan eksternal termasuk di dalamnya lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik. Kondusifitas ke tiga lingkungan tersebut sangat berpengaruh terhadap berhasilnya implementasi suatu kebijakan. Lingkungan sosial merupakan wilayah tempat kehidupan dan berlangsungnya interaksi. Lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk pribadi masyarakat karena biasanya hubungan antar sesama itu saling memengaruhi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi suatu wilayah tempat organisasi berada. Lingkungan ekonomi sangat memengaruhi kinerja dan pendapatan dari suatu wilayah. Adapun lingkungan politik merupakan faktor-faktor yang berkaitan dengan pemerintahan.

Pada teori Van Meter dan Van Horn Lingkungan sosial berkaitan dengan wilayah tempat kehidupan dan berlangsungnya interaksi. Dari lingkungan sosial kita dapat melihat bagaimana kehidupan sosial masyarakat (eksternal) dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada akan terpengaruh oleh Program Keluarga Harapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembedayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin bahwa bantuan yang disalurkan kepada masyarakat (KPM) itu sangat berguna bagi mereka, mereka memanfaatkannya uang yang diberikan untuk keperluan mereka sehari-hari sesuai dengan komponennya baik komponen pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial. Maka dari itu, dana PKH yang diberikan kepada mereka itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka, dengan adanya dana tersebut itu berdampak baik pada lingkungan sosial mereka dalam ini yaitu ekonomi.

Selanjutnya Lingkungan ekonomi berkaitan dengan sumber daya ekonomi yang tersedia untuk mendukung keberhasilan implementasi. Dalam hal ini yaitu anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Langsa untuk mendukung pelaksanaan PKH. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Langsa bahwa dalam pelaksanaan PKH di Kota Langsa, anggaran untuk penyaluran PKH tidak mengalami kendala tetapi anggaran lain untuk mendukung kegiatan PKH belum tercukupi, seperti fasilitas seperti kendaraan roda empat dan biaya operasional yang dibutuhkan oleh pendamping pkh agar mereka lebih mudah dalam melakukan observasi ataupun turun ke desa, tetapi sampai sekarang fasilitas tersebut belum bisa dialokasikan karena anggaran yang terbatas. Maka dari itu untuk Lingkungan Ekonomi belum berjalan dengan baik

Selanjutnya Lingkungan Politik berkaitan dengan partisipasi elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan, dalam hal ini yaitu seperti camat, kepala desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kota Langsa bahwa para camat dan kepala desa sangat berpartisipasi dalam mendukung program ini dan juga ini berdampak baik pada kehidupan ekonomi masyarakat, koordinator pkh selalu berkoordinasi dengan camat maupun kepala desa yang ada di seluruh wilayah kota langsa dan mereka merespon dengan baik terhadap program-program yang diarahkan di desa-desa yang ada di Kota Langsa.

### **3.6 Sikap Para Pelaksana**

Berdasarkan Wawancara kepada Koordinator PKH Kota Langsa beserta Pendamping PKH Kota Langsa bahwasanya para Pendamping PKH Kota Langsa sudah cukup paham terhadap tata tertib pelaksanaan PKH di Kota Langsa dan juga mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh pimpinan, dan juga tidak melakukan penolakan terhadap tugas maupun kebijakan, mereka selalu memberikan tanggapan yang baik dengan melayani masyarakat sekaligus menjadi fasilitator kepada mereka apabila mereka memiliki keluhan-keluhan pribadi mereka.

## **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial Kota Langsa**

Faktor Pendukungnya adalah 1) Konsistensi Pendamping PKH, Konsistensi yang dimiliki oleh pendamping PKH pada saat ini sangat mendukung jalannya program tersebut, salah satunya pendamping selalu melakukan interaksi dengan masyarakat seperti pertemuan P2K2 dan kegiatan lainnya. 2) Kecukupan personil yang sudah dimiliki Pendamping PKH, Pendamping PKH di Kota Langsa pada saat ini sudah terisi memenuhi kuota di tiap desa, jadi pelaksanaan PKH ini di tiap masing-masing desa sudah berjalan dengan lancar. 3) Komunikasi yang sudah berjalan dengan lancar baik internal maupun eksternal, Komunikasi yang sudah terbangun baik kepada instansi lain dan juga kepada camat maupun kepala desa sehingga itu yang mendukung PKH ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya Faktor Penghambatnya adalah 1) Biaya operasional yang tidak ada saat turun ke lapangan, biaya operasional yang tidak ada diberikan kepada pendamping pkh saat melakukan pendataan maupun pertemuan di desa, pendamping hanya memanfaatkan gaji maupun insentif mereka untuk melaksanakan pendataan masyarakat miskin. 2) Kepala desa tidak melakukan pendataan dengan baik, tidak ada kesadaran dari kepala desa untuk melakukan pendataan terhadap warganya yang miskin sehingga masyarakat miskin tidak dapat terdata dengan baik. 3) Sarana dan prasarana belum cukup maksimal dan memadai, sarana dan prasarana kepada pendamping pkh belum cukup maksimal dan memadai. Petugas lapangan pkh tentunya berharap dapat memiliki fasilitas yang diberikan oleh dinas seperti kendaraan roda 4 dan laptop untuk mendukung pelaksanaan pkh dan juga biaya operasional saat turun ke lapangan.

## **Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial Kota Langsa**

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Langsa adalah 1) Menggunakan biaya operasional pribadi saat turun ke lapangan dengan memanfaatkan gaji dan insentif pribadi yang dapat membantu tugas kegiatan pendataan. Dinas Sosial sudah melakukan penganggaran kepada pemerintah kota tetapi saat ini belum dapat teranggarkan karena keterbatasan anggaran. 2) Melakukan himbauan kepada kepala desa agar melakukan pendataan terhadap warga miskinnya yang ada di desa-masing-masing dan juga menghimbau agar kepala desa lebih peka terhadap lingkungannya. 3) Menggunakan sarana dan prasarana pribadi dalam pelaksanaan pendataan maupun pertemuan di desa yang dimiliki oleh pendamping, baik dengan laptop maupun kendaraan roda 4 yang dapat mendukung jalannya PKH.

### **3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam pelaksanaan program ini terdapat permasalahan/hambatan implementasi kebijakan ini adalah masih kurangnya biaya operasional saat turun ke lapangan, biaya operasional yang tidak ada diberikan kepada pendamping pkh saat melakukan pendataan maupun pertemuan di desa, sarana dan prasarana kepada pendamping pkh belum cukup maksimal dan memadai, dan kepala desa belum melakukan pendataan dengan baik terhadap warga miskin di desa masing-masing. Dengan adanya hambatan ini sekiranya agar dapat ditingkatkan fasilitas yang lengkap seperti biaya operasional, kepekaan kepala desa melakukan pendataan dan fasilitas kendaraan bermotor, dengan adanya hal tersebut pelaksanaan PKH berjalan dengan baik adanya fasilitas yang lengkap seperti alat ukur, PMT, vitamin serta suplemen kepada masyarakat diikuti dengan edukasi secara rutin, maka tujuan dari program ini dapat tercapai.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih terdapat hambatan didalam kegiatan terkait dengan teknis dalam pelaksanaan PKH, tetapi terkait dengan penyaluran PKH dan juga sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah berjalan dengan baik.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa Provinsi Aceh untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Langsa Provinsi Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. California: Sage Publications, Inc.
- Darmawati, T. (2022). *Kota Langsa Dalam Angka 2022*.
- Dye, T. (2017). *Understanding Public Policy*. United States : Pearson Education.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Kementerian Sosial. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. In *Kementerian Sosial Republik Indonesia*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Van Meter, V. H. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* (p. 445). London: Sage Publications, Inc.
- Yusriadi. (2020). *Pengentasan Kemiskinan: Program Keluarga Harapan dan Sociopreneur*. Yogyakarta: Deepublish.

## B. SKRIPSI DAN JURNAL

- Angkasa, G. D. (2018). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Desa Kedungrojo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/22377>
- Daud, M. (2018). *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/51>
- Dheby, C. (2017). *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/900>
- Hasmini. (2021). *Implementasi Program Kesejahteraan Keluarga Harapan di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara*. <https://journal.unibos.ac.id/paradigma/article/view/1209>
- Kiwang, A. S. (2018). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Kupang*. <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/5/7>
- Mandolang, Y. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/25346>
- Mediana, D. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/13906>
- Sugiyatna, R. (2022). *Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Rengasdengklok*. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2827>
- Waty, R. (2017). *Implementasi Program Keluarga Harapan Tahun 2016 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan*. [http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity\\_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/08/jurnal-upload1.pdf](http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/08/jurnal-upload1.pdf)
- Yunarni, B. R. T. (2019). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu)*. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JIAP/article/view/1276>

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

## D. WEBSITE

- Aceh, B. P. S. P. (2022). *Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh*. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. <https://aceh.bps.go.id/>
- Langsa, B. P. S. K. (2022). *Badan Pusat Statistik Kota Langsa*. Badan Pusat Statistik Kota Langsa. <https://langsakota.bps.go.id/>

Statistik, B. P. (2022). *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/>

## E. LAIN-LAIN

Nandy. (2022). *10 Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi di Suatu Negara / kumparan.com*. Gramedia. <https://www.gramedia.com/literasi/pendapatan-per-kapita/>

Pratama, C. D. (2020). *Faktor Penentu Kualitas Penduduk Halaman all - Kompas.com*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/14/144631069/faktor-penentu-kualitas-penduduk?page=all>

Wibowo, K. S. (2017). *Sri Mulyani: Kemiskinan Tantangan Besar dalam Pembangunan - Nasional Tempo.co*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/833119/sri-mulyani-kemiskinan-tantangan-besar-dalam-pembangunan>

